

Strategi Komunikasi dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Pertanian Skala Besar di Papua Selatan

Eka Setiawati¹, Agustinus Biay²

¹Program Studi Manajemen STIE Saint Theresa Merauke, Indonesia

²STIE Bukit Zaitun Sorong, Indonesia

*Email Korespondensi: eka.setiawati@sainttheresa.ac.id

Diterima: 20-07-2025 | Disetujui: 26-07-2025 | Diterbitkan: 28-07-2025

ABSTRACT

This study investigates strategies for optimizing public administration management in higher education to enhance academic performance and institutional competitiveness. The research aims to identify administrative constraints, explore digital transformation potentials, and propose adaptive governance models based on evidence-based policy approaches. A qualitative descriptive-analytical method was employed, utilizing in-depth interviews, document analysis, and direct observation within multiple administrative units at Saint Theresia College of Economics Merauke. The findings reveal four critical strategies: administrative digitalization, policy reform, capacity building for administrative staff, and strengthened inter-unit coordination. Implementation of these strategies led to significantly reduced processing times, improved data accuracy, and increased satisfaction among students and academic staff. Furthermore, performance-based policies and integrated management systems contributed to more transparent, efficient, and responsive academic services. The study highlights the importance of digital infrastructure, continuous staff training, and collaborative management practices in overcoming bureaucratic inefficiencies. It also emphasizes the need for institutional leadership to adopt sustainable administrative innovations aligned with global education standards. The implications suggest that adaptive, data-driven governance is essential for universities in peripheral regions to remain competitive in the era of digital transformation and globalization.

Keywords : *Public administration optimization; academic performance; service digitalization; policy reform; university governance.*

ABSTRAK

Studi ini menganalisis proses pengambilan keputusan dalam pelibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian skala besar di Papua Selatan, dengan fokus pada integrasi strategi komunikasi dan tata kelola kolaboratif. Tujuan studi ini adalah mengembangkan model kebijakan yang adaptif secara budaya untuk mengatasi tantangan pembangunan pertanian modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis, memanfaatkan wawancara mendalam, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), observasi partisipatif, dan studi dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dan model interaktif Miles & Huberman. Hasilnya menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif yang menghormati nilai-nilai budaya lokal dalam pengambilan keputusan, serta peran komunikasi adaptif dalam meningkatkan legitimasi kebijakan. Model kebijakan yang dikembangkan, Tata Kelola Pertanian Terpadu yang Responsif Secara Budaya (ICRAG), terdiri dari lima komponen utama yang mendorong pertanian berkelanjutan dan inklusif. Model ini dapat menjadi referensi

bagi kebijakan pertanian di Papua Selatan dan wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Kata Kunci : Pengambilan Keputusan; Tata Kelola Kolaboratif; Kebijakan Berbasis Budaya; Pertanian Berkelanjutan; Papua Selatan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setiawati, E., & Biay, A. . (2025). Strategi Komunikasi dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Pertanian Skala Besar di Papua Selatan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(3), 755-765. <https://doi.org/10.63822/xs44sq65>

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi dan keragaman budaya yang semakin meningkat, keterlibatan pemangku kepentingan menjadi tantangan yang kompleks. Perbedaan nilai, norma, dan ekspektasi budaya dapat mempengaruhi persepsi dan interaksi antar pemangku kepentingan, sehingga komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk menjembatani persepsi tersebut. Sebagai contoh, penelitian oleh Kenesei dan Stier (2017) menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam interaksi layanan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. SAGE Journals. Strategi komunikasi yang adaptif dan inklusif diperlukan untuk mengatasi hambatan budaya dalam keterlibatan pemangku kepentingan. Studi oleh Haris dkk. (2024) menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang melibatkan partisipasi komunitas dan pemimpin adat dalam program pemberdayaan masyarakat adat Papua, guna mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pendekatan komunikasi yang ditargetkan dan disesuaikan dengan karakteristik budaya pemangku kepentingan terbukti lebih efektif dibandingkan strategi komunikasi yang seragam (Olander & Landin, 2005). Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang konteks budaya dan penerapan strategi komunikasi yang tepat menjadi faktor krusial dalam keberhasilan keterlibatan pemangku kepentingan.

Partisipasi pemangku kepentingan merupakan landasan utama dalam strategi komunikasi yang efektif. Keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemimpin komunitas, instansi pemerintah, dan sektor swasta, diperlukan untuk membangun komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan. ResearchGate Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan seperti Analisis Prospektif Partisipatif (PPA) telah diterapkan dalam perencanaan tata guna lahan di Indonesia. Shantiko dkk. (2021) menemukan bahwa PPA mendorong keterlibatan aktif pemangku kepentingan dan memastikan suara lokal terdengar dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks proyek pertanian skala besar, proses pengambilan keputusan yang inklusif dan berbasis data menjadi kunci keberhasilan implementasi program pembangunan. Penelitian terbaru pentingnya keterlibatan sistematis pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Ebrahimi, Schillo, dan Bronson (2021) mengembangkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pemangku kepentingan dalam ekosistem pertanian digital, yang dapat diterapkan untuk memastikan partisipasi yang efektif dan representatif dalam pengambilan keputusan. MDPI

Keterlibatan aktif pemangku kepentingan, terutama petani sebagai penerima manfaat utama, terbukti meningkatkan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Studi oleh Guntukougula Pattabhi dkk. (2023) menunjukkan bahwa sikap positif terhadap komunikasi dan layanan pertanian digital berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian melalui komunikasi data dan informasi secara real-time kepada pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan yang melibatkan pemangku kepentingan secara langsung dapat meningkatkan efektivitas intervensi pertanian skala besar, melalui pendekatan tata kelola kolaboratif yang telah terbukti efektif dalam mengintegrasikan berbagai perspektif dan kepentingan, seperti yang ditunjukkan dalam studi tentang desa adat di Bali, di mana keterlibatan aktor lokal dalam proses pengambilan keputusan memperkuat legitimasi dan keinginan kebijakan (Wiyantari Sutaryantha & Kusumasari, 2020).

Implementasi tata kelola kolaboratif tidak selalu berjalan mulus; Studi di Bandar Lampung menunjukkan bahwa faktor budaya, institusional, dan politik dapat menjadi hambatan dalam proses kolaborasi (Suryani et al., 2022). integrasi pengetahuan lokal dan tradisional dalam proses pengambilan

keputusan dapat meningkatkan kapasitas adaptif institusi tata kelola (Fidelman, 2021). Dengan demikian, kombinasi antara tata kelola kolaboratif dan pendekatan adaptif dapat memperkuat proses pengambilan keputusan dalam pembangunan pertanian skala besar yang berkelanjutan. Pendekatan kompleksitas adaptif dalam tata kelola menjadi penting dengan adaptive co-management, yang menggabungkan pembelajaran bersama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, telah diidentifikasi sebagai strategi efektif dalam menghadapi hubungan sosial-ekologis (Armitage et al., 2009). Sebagai pelengkap dari pendekatan kolaboratif dan adaptif, Mauri Model Decision Making Framework (MMDMF) menawarkan kontribusi unik dengan mengintegrasikan pengetahuan ekologis tradisional dalam proses pengambilan keputusan. Model ini menilai empat dimensi kemiskinan sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya sehingga sangat relevan dengan konteks Papua Selatan yang sarat dengan nilai kearifan lokal (Wambrauw & Morgan, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan MMDMF di Merauke memberikan perspektif holistik yang mendukung kebijakan lebih inklusif dan berkelanjutan (Fidelman, 2021). Dengan menggabungkan pendekatan ini, pengambilan keputusan dalam proyek pertanian besar seperti MIFEE dapat diarahkan untuk merespons satwa liar ekologi, pemberdayaan masyarakat adat, dan pelestarian budaya secara bersamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam keterlibatan pemangku kepentingan pada pengembangan pertanian skala besar di Papua Selatan, dengan tekanan pentingnya komunikasi strategi komunikasi dan tata kelola kolaboratif. Secara khusus, penelitian ini ingin mengembangkan model kebijakan berbasis budaya yang adaptif terhadap tantangan pembangunan pertanian modern. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada dua hal utama. Pertama, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif antara strategi komunikasi dan proses pengambilan keputusan dalam konteks keterlibatan pemangku kepentingan, yang sebelumnya kerap dikaji secara terpisah. Kedua, penelitian ini menempatkan konteks lokal Papua, khususnya kearifan lokal dan pengetahuan ekologis tradisional, sebagai fondasi utama dalam merancang model pengambilan keputusan yang responsif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan kerangka kolaboratif seperti Collaborative Governance dan Mauri Model Decision Making Framework, untuk dapat mengembangkan teori yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami proses sosial yang kompleks dalam pengambilan keputusan, interaksi antar pemangku kepentingan, serta nilai-nilai budaya yang mempengaruhi kebijakan pengembangan pertanian. Lokasi penelitian di wilayah pengembangan pertanian skala besar di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Subjek penelitian dipilih secara purposif dan mencakup perwakilan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian dan Bappeda, pemangku kepentingan adat dan tokoh masyarakat, kelompok tani serta pelaku usaha agribisnis, dan juga akademisi serta LSM yang bergerak di bidang pembangunan lokal dan pertanian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci untuk menggali praktik komunikasi, nilai budaya lokal, dan pengalaman dalam pengambilan keputusan pembangunan pertanian. Selain itu, digunakan juga Focus Group Discussion (FGD) dengan para peneliti dari universitas Musamus untuk membangun dan menguji pemahaman bersama mengenai kolaborasi serta potensi model kebijakan yang inklusif dan adaptif. Observasi partisipatif

dilakukan dalam berbagai forum dialog, kegiatan pertanian masyarakat, dan rapat koordinasi lintas aktor. Data juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kebijakan, peraturan, laporan kegiatan, serta literatur yang berkaitan dengan budaya lokal dan pembangunan pertanian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik dan model interaktif Miles & Huberman. Proses analisis mencakup reduksi data dengan mengelompokkan informasi penting berdasarkan tema seperti komunikasi, budaya lokal, peran aktor, dan tantangan kebijakan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk matriks tematik, narasi interpretatif, dan skema hubungan antar aktor. Tahap akhir adalah kesimpulan yang bertujuan merumuskan pola dan prinsip-prinsip yang relevan untuk model pengembangan kebijakan berbasis budaya yang adaptif. Model kebijakan awal dirancang dengan mencakup tata kelola kolaboratif, komunikasi inklusif, dan integrasi budaya lokal, lalu divalidasi melalui FGD dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Validitas data diperiksa dengan triangulasi sumber, member check, dan diskusi dengan pakar, yang dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman tentang pengambilan keputusan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian. Model kebijakan berbasis budaya yang adaptif ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pertanian di Papua Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan teori ekologi sosial memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika interaksi antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan di Papua Selatan. Penerapan teori ini dalam implementasi ISPO di Kabupaten Merauke menekankan pentingnya rekonsiliasi historis dan inklusivitas budaya sebagai fondasi untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan (Tjilen dkk., 2025). Prinsip keadilan ekologis yang tercermin dalam ensiklik *Laudato Si'* menegaskan urgensi integrasi konservasi alam, hak asasi manusia, dan pelestarian warisan budaya, sebagaimana tercermin dalam studi tentang masyarakat adat Marind yang menunjukkan pentingnya pengetahuan ekologi tradisional dalam proses pengambilan keputusan (Sarang dkk., 2024). Selain itu, kerangka tata kelola kolaboratif dan pendekatan adaptif menjadi penting dalam mengelola konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta, seperti yang terlihat dalam kasus proyek MIFEE (Iswandi, 2023; Ginting & Pye, 2013). Model Mauri sebagai sistem pengambilan keputusan yang mengintegrasikan dimensi ekologis, budaya, dan keberlanjutan modern telah terbukti efektif melalui penerapan MMDMF di Merauke dalam mengevaluasi dampak sosial-lingkungan dari proyek pertanian berskala besar (Wambrauw & Morgan, 2016; Wambrauw, 2015). Pendekatan-pendekatan ini secara kolektif menekankan perlunya sistem tata kelola yang inklusif, responsif, dan berbasis pengetahuan lokal untuk mencapai keadilan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

Tebal 1. Analisis Perbandingan Kerangka Kerja dan Model Utama

Kerangka Kerja/Model		Fitur Utama	Aplikasi di Papua Selatan
Teori Sosial	Ekologi	Meneliti interaksi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.	Diterapkan pada implementasi ISPO di Kabupaten Merauke untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Model Mauri	Mengintegrasikan pengetahuan ekologi tradisional ke dalam proses pengambilan keputusan.	Digunakan untuk menilai keberlanjutan proyek MIFEE, dengan menekankan kesejahteraan budaya dan lingkungan.
Tata Kelola Kolaboratif	Menekankan rekonsiliasi dan pendekatan adaptif terhadap penyelesaian konflik.	Diterapkan untuk mengatasi konflik penggunaan lahan dan mempromosikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam MIFEE.
Analisis Prospektif Partisipatif (PPA)	Memfasilitasi platform multipemangku kepentingan untuk perencanaan berorientasi masa depan.	Digunakan dalam perencanaan penggunaan lahan di Kabupaten Merauke untuk mengembangkan skenario pengelolaan lahan berkelanjutan.

Analisis terhadap berbagai kerangka kerja dan model yang diterapkan di Papua Selatan menunjukkan pendekatan yang beragam namun saling melengkapi dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, konflik tata guna lahan, serta keterlibatan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lokal. Keempat pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu kerangka kerja tunggal yang dapat menjawab seluruh kompleksitas tantangan di Papua Selatan. Justru, kombinasi dari teori sosial ekologis, model berbasis nilai lokal seperti Mauri, tata kelola kolaboratif, dan analisis prospektif partisipatif menyediakan landasan konseptual dan praktis yang kuat untuk membangun tata kelola pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di wilayah yang sarat dengan dinamika sosial budaya seperti Merauke.

Integrasi antara prinsip ekonomi hijau dan kearifan lokal menjadi landasan utama dalam pembangunan pertanian berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan produktivitas, tetapi juga kelangsungan sosial dan ekologis. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sistem pertanian tradisional seperti Subak di Bali, Sasi di Maluku, dan Tana Ulen di Kalimantan mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menjaga tatanan sosial masyarakat (Wijaya & Sarjan, 2024). Temuan serupa juga relevan di Papua Selatan, khususnya di Merauke, yang menjadi lokasi pelaksanaan proyek MIFEE. Di sana, pertanian adat yang berbasis pada hubungan harmonis antara manusia dan alam memiliki potensi besar untuk dijadikan kerangka dasar pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Teori Ekologi Sosial memberikan kerangka konsep penting untuk memahami bagaimana interaksi antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan membentuk praktik dan keputusan dalam pembangunan pertanian. Penerapan teori ini dalam proyek-proyek seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) di Kabupaten Merauke membantu menjelaskan kompleksitas hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta, serta bagaimana dinamika kekuasaan dan nilai budaya mempengaruhi keberhasilan program-program pembangunan (Tjilen et al., 2025). Dengan menggunakan perspektif ini, strategi komunikasi yang diterapkan harus bersifat interaktif dan kontekstual, serta memperhatikan struktur sosial dan nilai-nilai lokal dalam menyampaikan pesan dan membangun dialog.

Sementara itu, Model Mauri memberikan pendekatan metodologis yang tekanan pada integrasi pengetahuan ekologis tradisional (traditional ecology knowledge) ke dalam proses pengambilan keputusan modern. Dalam evaluasi proyek MIFEE, model ini digunakan untuk menilai nasib buruk dari perspektif kesejahteraan budaya dan lingkungan hidup masyarakat lokal (Wambrauw & Morgan, 2016; Wambrauw, 2015). Model ini menempatkan nilai-nilai adat sebagai pusat dalam menilai keberhasilan proyek pembangunan, bukan semata-mata melalui indikator ekonomi formal. Oleh karena itu, komunikasi dalam konteks ini tidak bisa bersifat top-down, melainkan harus berbasis dialog budaya, penghormatan terhadap sistem pengetahuan lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan. Pentingnya strategi komunikasi dan pengambilan keputusan kolaboratif juga ditegaskan dalam pendekatan Collaborative Governance dan Participatory Prospective Analysis (PPA). Keduanya berperan dalam menciptakan ruang deliberatif yang memungkinkan terjadinya dialog antar pemangku kepentingan, konflik

mengurangi lahan, serta membangun skenario bersama untuk pengelolaan pertanian berkelanjutan di Merauke (Iswandi, 2023; Shantiko et al., 2021). Ketika masyarakat merasa dilibatkan secara setara, maka legitimasi sosial terhadap kebijakan meningkat, dan resistensi terhadap program pembangunan dapat diminimalisir.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Kurnia dkk. (2022), pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem pertanian seperti yang terjadi di Ciamis di mana tanah diwariskan kepada perempuan untuk mencegah fragmentasi lahan membuktikan bahwa kolaborasi antara sistem hukum negara dan hukum adat dapat memperkuat ketahanan pangan dan kelangsungan pertanian. Hal ini sangat relevan bagi Papua Selatan yang memiliki keragaman struktur adat dan hubungan spiritual yang kuat terhadap tanah. Pengalaman di Desa Jati Bali juga memberikan pelajaran penting. Di sana, peningkatan literasi ekologi melalui program ekonomi hijau berhasil meningkatkan kesadaran petani akan keinginan (Setyawati et al., 2024). Dalam konteks Papua Selatan, pendekatan serupa dapat disesuaikan melalui komunikasi yang disesuaikan dengan bahasa lokal, simbol budaya, dan media yang akrab dengan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan bergantung pada kemampuan untuk menggabungkan prinsip ekonomi hijau, kearifan lokal, serta pendekatan teoritis yang inklusif seperti Teori Ekologi Sosial dan Model Mauri. Sinergi ini perlu diwujudkan melalui strategi komunikasi yang terbuka dan partisipatif, di mana semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan semacam ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan dan nilai budaya, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan sosial dalam setiap aspek pembangunan pertanian skala besar. Namun di sisi lain, alih fungsi hutan alam menjadi lahan perkebunan besar telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Berbagai kajian menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif, yang mengutamakan hak masyarakat adat dan memulihkan fungsi ekosistem alami (Sarang et al., 2024; Sianipar & Nurish, 2021). Dalam konteks ini, proyek Food Estate di Merauke dapat dilihat sebagai upaya untuk mencari solusi atas ketimpangan ekonomi, sosial, dan budaya dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus benar-benar mempertimbangkan suara dan kepentingan masyarakat lokal.

Tabel 2. Persepsi Terhadap Proses Pengambilan Keputusan

Pengenal	Pemangku kepentingan	Tantangan Terhadap Keterlibatan	Strategi Komunikasi Terapan	Observasi Lapangan
1	Pemimpin Komunitas Adat	Keterbatasan Akses	Komunikasi Adaptif	Konflik Antar Pemangku Kepentingan
2	Pihak Swasta	Kurangnya Kepercayaan	Komunikasi Adaptif	Proses Pengambilan Keputusan Lambat
3	Pemimpin Komunitas Adat	Keterbatasan Akses	Komunikasi Adaptif	Proses Pengambilan Keputusan Lambat
4	Pemimpin Komunitas Adat	Ketidakseimbangan Kekuatan	Pendekatan Partisipatif	Proses Pengambilan Keputusan Lambat
5	Pemimpin Komunitas Adat	Kurangnya Kepercayaan	Pendekatan Partisipatif	Proses Pengambilan Keputusan Lambat
6	Pihak Swasta	Keterbatasan Akses	Komunikasi Adaptif	Komunikasi Terhambat

Strategi Komunikasi dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Pertanian Skala Besar di Papua Selatan
(Setiawati, et al.)

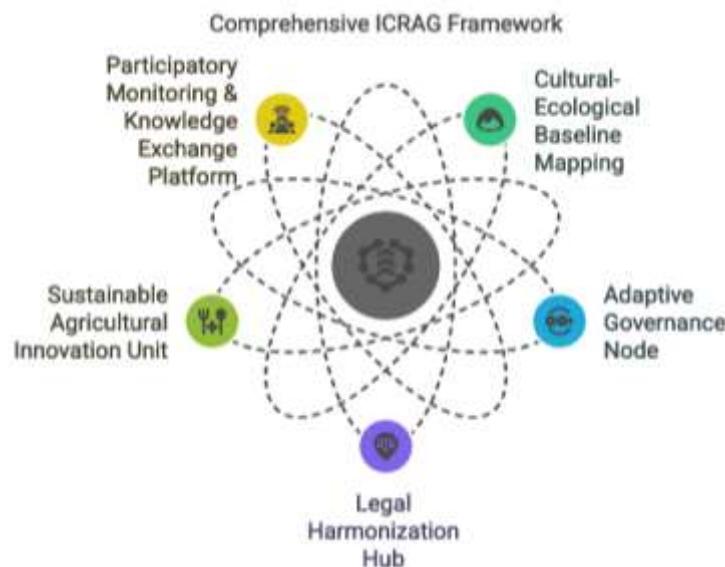
7	Pemerintah Daerah	Kurangnya Kepercayaan	Penyuluhan Berkelanjutan	Konflik Antar Pemangku Kepentingan
8	Pemimpin Komunitas Adat	Kurangnya Kepercayaan	Komunikasi Adaptif	Proses Pengambilan Keputusan Lambat
9	Pemerintah Daerah	Keterbatasan Akses	Komunikasi Adaptif	Kolaborasi yang Baik
10	Pemerintah Daerah	Perbedaan Budaya	Penyuluhan Berkelanjutan	Kolaborasi yang Baik

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek pertanian besar di Papua Selatan ditandai oleh sejumlah tantangan dan dinamika komunikasi yang beragam. Berikut adalah narasi yang mencakup hasil temuan tersebut: Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam keterlibatan mereka dalam proyek pertanian ini meliputi terbatasnya akses informasi dan rendahnya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Pemimpin komunitas adat, misalnya, sering kali merasa terlindungi akibat terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan terkait dengan keputusan yang diambil dalam proyek tersebut. Hal ini juga terjadi pada pihak swasta yang mengeluhkan kurangnya kepercayaan dari pihak lain, sehingga mempengaruhi efektivitas kerja sama dalam proyek. Selain itu, terdapat juga tantangan terkait dengan keseimbangan kekuatan antara kelompok-kelompok yang terlibat. Pemimpin komunitas adat, misalnya, mengungkapkan bahwa mereka sering kali merasa keputusan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi atau kepentingan mereka. Keterbukaan ini menyetujui rasa tidak puas dan memicu ketegangan di antara pemangku kepentingan.

Berbagai strategi komunikasi diterapkan oleh pemangku kepentingan untuk mengatasi keterlibatan ini. Salah satu strategi yang dominan adalah komunikasi adaptif, yang banyak diterapkan oleh pemimpin komunitas adat dan pihak swasta. Komunikasi ini mencakup upaya untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan situasi dan audiens yang berbeda, guna membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi ketegangan yang muncul. Selain itu, pendekatan partisipatif juga diterapkan oleh pemimpin komunitas adat dan pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara mereka terdengar. Namun, meskipun strategi ini diterapkan, tantangan terkait akses informasi yang terbatas dan kepercayaan yang rendah masih tetap menjadi hambatan yang signifikan.

Observasi lapangan menunjukkan adanya dinamika interaksi dan kolaborasi yang cukup beragam. Di satu sisi, terdapat kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan beberapa pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam hal penyuluhan berkelanjutan dan kegiatan kolaboratif. Namun di sisi lain, terdapat juga konflik antar pemangku kepentingan yang muncul karena perbedaan kepentingan dan perspektif yang berbeda. Selain itu, proses pengambilan keputusan sering kali terhambat, baik oleh faktor administratif maupun oleh adanya keseimbangan dalam pengaruh antara kelompok-kelompok yang terlibat. Beberapa pemangku kepentingan merasa bahwa keputusan yang diambil terlalu lambat, sementara yang lain merasa keputusan tersebut tidak mencerminkan kepentingan mereka. Secara keseluruhan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek pertanian besar di Papua Selatan menunjukkan adanya tantangan yang cukup kompleks, termasuk masalah akses informasi, kepercayaan, dan kekuatan. Meskipun berbagai strategi komunikasi, seperti komunikasi adaptif dan pendekatan partisipatif, telah diterapkan, tantangan tersebut tetap menjadi kendala yang signifikan dalam menciptakan interaksi yang efektif dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki komunikasi antar pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Model Integrated Culturally Responsive Agricultural Governance (ICRAG) dikembangkan sebagai kerangka kebijakan pertanian yang mengintegrasikan kearifan lokal, tata kelola kolaboratif, dan inovasi berkelanjutan. Model ini terdiri dari lima komponen utama, yaitu pemetaan sosial-ekologis berbasis budaya, badan tata kelola adaptif, harmonisasi hukum adat dan nasional, unit inovasi pertanian berkelanjutan, serta platform pemantauan dan pertukaran pengetahuan partisipatif. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan kontekstual dalam menghadapi tantangan modernisasi pertanian di Papua Selatan. Tujuan dari Integrated Culturally Responsive Agricultural Governance (ICRAG) adalah, mewujudkan tata kelola pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, berlandaskan pada keadilan ekologis dan sosial, serta memperkuat kemandirian masyarakat lokal secara ekonomi, politik, dan budaya. Pendekatan ICRAG memungkinkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang menghargai struktur ekologi sosial komunitas adat serta kondisi lokal. Melalui pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, model ini mendorong terciptanya pertanian yang tidak hanya produktif dan berkelanjutan, tetapi juga menjaga identitas budaya dan hak masyarakat adat. ICRAG memberikan arah kebijakan yang lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, hukum, dan lingkungan yang kompleks di wilayah Papua. Framework dari ICRAG dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Framework Integrated Culturally Responsive Agricultural Governance (ICRAG)

Pendekatan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan memerlukan desain kelembagaan yang mengintegrasikan dimensi budaya, ekologis, dan tata kelola adaptif. Langkah awal dimulai dari *pemetaan dasar budaya-ekologi* yang mencakup identifikasi nilai-nilai adat, zonasi lahan adat, jenis tanaman lokal, dan praktik pertanian tradisional untuk menjadi data dasar dalam perencanaan formal. Selanjutnya, dibentuk *Node Tata Kelola Adaptif* sebagai badan pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan perwakilan adat, pemerintah daerah, petani lokal, dan sektor swasta, dengan menerapkan prinsip kolaboratif dan demokrasi deliberatif. Untuk menjembatani dualisme hukum, diperlukan *Pusat Harmonisasi Hukum* yang mengintegrasikan hukum adat dengan peraturan nasional terkait agraria dan lingkungan, serta menyediakan ruang mediasi konflik. Selain itu, *Unit Inovasi Pertanian Berkelanjutan* berperan dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan sistem pertanian cerdas iklim melalui kerja sama dengan lembaga riset. Semua ini didukung oleh *Platform Pemantauan Partisipatif dan Pertukaran Pengetahuan*

berbasis komunitas yang mendokumentasikan praktik terbaik dan dampak sosial-ekologis, serta memfasilitasi pembelajaran lintas komunitas sebagai strategi peningkatan kapasitas dan ketahanan kolektif. Tahapan implementasi model ICRAAG dimulai dengan dialog multikultural dan konsolidasi nilai, yang bertujuan membangun kesepahaman antara pemangku kepentingan dengan menghargai nilai lokal dan perspektif ekologis. Selanjutnya dilakukan ko-produksi pengetahuan melalui kolaborasi antara ahli dan komunitas untuk menggabungkan ilmu modern dengan kearifan lokal. Tahap berikutnya adalah desain kebijakan yang inklusif dan adaptif, disusun secara partisipatif untuk menjawab tantangan lokal. Kebijakan ini kemudian diuji melalui uji coba terbatas dan diulang secara bertahap guna memastikan efektivitasnya dalam berbagai konteks. Terakhir, dilakukan evaluasi partisipatif dan revisi kebijakan, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif untuk pada peningkatan mutu akademik.

KESIMPULAN

Penerapan ekonomi hijau yang selaras dengan kearifan lokal terbukti menjadi landasan penting dalam membangun pertanian berkelanjutan di Papua Selatan. Studi ini menemukan bahwa pendekatan partisipatif yang menghormati nilai-nilai budaya lokal, didukung strategi komunikasi yang adaptif, mampu meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Teori Ekologi Sosial dan Mauri Model berperan penting dalam menjembatani kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta. Temuan lapangan mengungkap tantangan dalam keterlibatan pemangku kepentingan seperti keterbatasan informasi, ketimpangan kekuasaan, dan perbedaan budaya. Namun, ketika komunikasi dilakukan secara dialogis dan berbasis penghormatan terhadap sistem pengetahuan lokal, proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif dan kolaboratif. Menjawab tantangan tersebut, Model Tata Kelola Pertanian Terpadu yang Responsif Secara Budaya (ICRAAG) dikembangkan untuk menghasilkan kebijakan yang kontekstual dan inklusif. Model ini terdiri dari lima komponen utama yang mencerminkan prinsip ekologis, sosial, dan budaya: tata kelola sosial-ekologis, tata kelola adaptif, harmonisasi hukum, inovasi pertanian berkelanjutan, serta pemantauan partisipatif. Dengan tekanan partisipasi aktif dan pengakuan terhadap struktur sosial lokal, ICRAAG mendorong pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga adil dan berkelanjutan menjadikannya model yang dapat direplikasi di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Armitage, D., Berkes, F., & Doubleday, N. (2009). Ko-manajemen adaptif: Kolaborasi, pembelajaran, dan tata kelola multi-level. UBC Press.
- Armitage, D., Berkes, F., & Doubleday, N. (2009). Ko-manajemen adaptif: Kolaborasi, pembelajaran, dan tata kelola multi-level. UBC Press.
- Ashby, JA, Gracia, AT, Del Pilar Guerrero, M., Quiros, CA, Roa, JI, & Beltran, JA (1995). Melembagakan partisipasi petani dalam pengujian teknologi adaptif dengan "CIAL." Jaringan Penelitian dan Penyuluhan Pertanian ODI. Makalah Jaringan 57. Wikipedia
- Ebrahimi, HP, Schillo, RS, & Bronson, K. (2021). Inklusi pemangku kepentingan sistematis dalam pertanian digital: Sebuah kerangka kerja dan penerapannya di Kanada. *Keberlanjutan*, 13(12), 6879. <https://doi.org/10.3390/su13126879MDPI>
- Fidelman, P. (2021). Menilai kapasitas adaptif lembaga tata kelola kolaboratif. Dalam R. Djalante & B. Siebenhüner (Eds.), *Adaptiveness: Changing Earth System Governance* (hlm. 85–102). Cambridge University Press.

- Fidelman, P. (2021). Menilai kapasitas adaptif lembaga tata kelola kolaboratif. Dalam R. Djalante & B. Siebenhüner (Eds.), *Adaptiveness: Changing Earth System Governance* (hlm. 85–102). Cambridge University Press.
- Guntukougula Pattabhi, S., Ganesamoorthi, S., Raghuprasad, KP, Gowda, VG, Benherlal, PS, & Kumar, TLM (2023). Menjelajahi sikap pemangku kepentingan terhadap komunikasi dan layanan pertanian digital. *Jurnal Pendidikan Penyuluhan India*, 59(4), 91–96. <https://doi.org/10.48165/>
- Haris, H., Unde, AA, Palubuhu, DAT, & Fatimah, JM (2024). Peran Komunikasi dalam Mengatasi Hambatan Budaya dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua. *Jurnal Agama Internasional*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.61707/cx60bw93Ijor>
- Hikuroa, D., Slade, A., & Gravley, D. (2021). Menerapkan Pengetahuan Pribumi Māori (Mātauranga) dalam Paradigma Ilmiah: Mengembalikan Mauri ke Te Kete Poutama. Diperoleh dari <https://mauriometer.org>
- Kenesei, Z., & Stier, Z. (2017). Mengelola komunikasi dan hambatan budaya dalam pertemuan layanan antarbudaya: Strategi dari kedua sisi konter. *European Journal of Cross-Cultural Competence and Management*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.1177/1356766716676299SAGE Journals>
- Morgan, TKKB (2021). Model Mauri DMF unik karena mampu mencakup berbagai pandangan dunia dan mengadopsi mauri (nilai intrinsik atau kesejahteraan) sebagai pengganti penilaian pseudo-keberlanjutan yang lebih umum dan dimonetisasi menggunakan Analisis Biaya-Manfaat. Diambil dari <https://www.researchgate.net>
- Olander, S., & Landin, A. (2005). Evaluasi pengaruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. *Jurnal Manajemen Proyek Internasional*, 23(4), 321–328. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.02.002>
- Shantiko, B., dkk. (2021). Perencanaan skenario partisipatif untuk pemanfaatan lahan berkelanjutan di Merauke, Papua. *Sustainability Science*, 16(3), 789–803.
- Suryani, I., Susanti, D., & Pratama, A. (2022). Analisis kritis terhadap tantangan tata kelola kolaboratif dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim di Kota Bandar Lampung, Indonesia. *Sustainability*, 14(7), 4077. <https://doi.org/10.3390/su14074077>
- Suryani, I., Susanti, D., & Pratama, A. (2022). Analisis kritis terhadap tantangan tata kelola kolaboratif dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim di Kota Bandar Lampung, Indonesia. *Sustainability*, 14(7), 4077. <https://doi.org/10.3390/su14074077>
- Wambrauw, EV, & Morgan, TKKB (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa MMDMF dapat dipindahtangankan dan meskipun penilaian menunjukkan proyek tersebut menguntungkan dimensi ekonomi dan sosial, dimensi budaya dan lingkungan justru berkurang. Diambil dari <https://www.researchgate.net>
- Wambrauw, K., & Morgan, TKKB (2016). Menilai keberlanjutan pembangunan pangan-energi di Papua menggunakan Model Mauri. *Jurnal Internasional Pembangunan dan Perencanaan Berkelanjutan*, 11(2), 179–191. <https://doi.org/10.2495/SDP-V11-N2-179-191>
- Wambrauw, K., & Morgan, TKKB (2016). Menilai keberlanjutan pembangunan pangan-energi di Papua menggunakan Model Mauri. *Jurnal Internasional Pembangunan dan Perencanaan Berkelanjutan*, 11(2), 179–191. <https://doi.org/10.2495/SDP-V11-N2-179-191>
- Wiyantari Sutaryantha, MP, & Kusumasari, B. (2020). Tata kelola kolaboratif masyarakat adat: Pemahaman tentang proses pengambilan keputusan di desa adat di Bali, Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Udayana*, 4(2), 119–145. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p01>
- Wiyantari Sutaryantha, MP, & Kusumasari, B. (2020). Tata kelola kolaboratif masyarakat adat: Pemahaman tentang proses pengambilan keputusan di desa adat di Bali, Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Udayana*, 4(2), 119–145. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p01>